



# KPK Gali Data

## Kasus Batu

### Ampar

#### Soal Izin, Dana ke Kas Daerah, hingga Agunan Miliaran Rupiah

**GEROKGAK** - Benang kusut kasus lahan di Batu Ampar, Pejarakan, Gerokgak, kembali menyeruak. Ini tak lepas dari munculnya tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gumi Panji Sakti, Buleleng. Kedatangan tim tersebut untuk mengumpulkan data terkait perizinan, aliran dana, hingga HGB yang dikuasai PT Prapat Agung Permai seluas 16 hektare lahan negara dijadikan anggungan miliaran rupiah di sebuah bank.

Informasi yang digali Jawa Pos Radar Bali, kasus ini memang terbilang sangat lama. Bahkan sudah berlangsung dua puluh tahun silam. Yakni pada 1990 di mana 77 kepala keluarga (KK) yang menggarap lahan negara harus angkat kaki dari lahan yang sudah turun-temurun mereka tempati. Penyebabnya, lahan negara yang diklaim

dikuasai Pemkab Buleleng itu akan digunakan untuk membangun cottage bintang empat.

Singkat kata, sejak saat ini polemik tak berkesudahan terus berlanjut. Warga penggarap yang mengklaim sudah menggarap lahan turun-temurun sejak 1958 dan diperkuat Surat Keputusan (SK) Mendagri 1982 serta surat dari Agraria Bali Utara tahun 1962 itu terus berjuang. Dari melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum, DPRD Buleleng, hingga DPRD Bali. Demikian, sampai saat ini tak menunjukkan kejelasan.

Di tengah publikasi yang meredup, tiba-tiba saja tim KPK muncul di Buleleng. Kabarnya, tim KPK datang tak lepas dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) yang dimotori Gede Suardana.

Pastinya, selama tiga hari tim KPK sudah ada di Buleleng dan mengumpulkan beragam bukti dan keterangan dari beberapa pihak. Yakni pada

Edisi : Minggu 1 April 2010

Hal. : 9